

## **BAB II**

### **DINAMIKA PERANG IRAK, AMERIKA SERIKAT, DAN EKSISTENSI PMC**

Perang Irak merupakan konflik bersenjata yang sudah mencapai tingkat perang antara AS dan Irak. Latar belakang dari sebab-sebab awal perang Irak juga dapat dilihat dalam perjalanan maupun sejarah konflik dimasa lalu antara AS-Irak yang sudah terjadi sebelumnya. Misalnya, dapat dicontohkan ketika invasi Kuwait terjadi dimana Irak memegang kendali oli atas Kuwait dengan berbagai alasan yang membuat AS tidak setuju dengan tindakan tersebut. Dalam perang Irak perbedaan kekuatan militer antara AS dan Irak dapat dilihat dari beberapa hal seperti dukungan terhadap AS dari negara-negara besar yang menjadi sekutu seperti Inggris misalnya, perbedaan teknologi perang, dan perbedaan komposisi pasukan perang Irak dengan sekutu. Tidak lupa pada bagian bab ini diperlukan pembahasan khusus secara umum mengenai eksistensi dari PMC, pengenalan awal, manfaat dari penggunaan jasa kelompok militer privat tersebut. Selain memiliki keuntungan yang besar, yaitu penggunaan jasa PMC dapat memberikan kekuatan militer tambahan bagi negara pengguna, perlu dibahas juga mengenai risiko yang ikut serta dalam proses penggunaannya. Untuk itu penting untuk membahas mengenai eksistensi PMC serta identifikasi dari fungsi, keuntungan, dan risiko yang dimiliki oleh jasa yang disediakan.

#### **2.1 Dinamika perang Irak**

##### **2.1.1 Invasi Kuwait**

Sebelum perang Irak terjadi, terdapat peristiwa konflik bersenjata yang menjadi pendahulu (*Prelude*) dan merupakan bagian dari awal konflik antara AS dengan Irak sebelum perang Irak pada tahun 2003. Untuk itu akan dijelaskan mengenai konflik awal yaitu invasi Kuwait. Invasi tersebut terjadi pada tanggal 2 Agustus tahun 1990, dimana pasukan Irak menginvasi dan menduduki Kuwait. Invasi tersebut dilatarbelakangi oleh tuduhan Irak kepada Kuwait yang dicurigai melakukan pencurian penambangan oli petroleum. Invasi Kuwait langsung mengarah pada kecaman internasional dan memicu pembentukan pasukan aliansi internasional oleh negara lain yang mendukung Kuwait seperti AS misalnya. AS bersama dengan pasukan negara aliansi seperti Australia, Inggris, Prancis, Arab Saudi, dan berbagai negara lain yang mendukung Kuwait, berhasil mengumpulkan sekitar 600.000

pasukan bersenjata. Persiapan ini dilakukan dalam rangka membebaskan Kuwait, tepatnya pada awal bulan September dan akhir Desember tahun 1990 (Nick Ritchie, 2007, p.7).

Motif invasi Irak terhadap Kuwait dapat dilihat dari beberapa poin utama yang bisa diperhatikan. Pertama, konflik perseteruan oli antara Irak dengan Kuwait diawali dengan tuduhan Irak bahwa Kuwait melakukan penambangan di ladang oli utama Irak yaitu Rumalia (Hayes, 1990, p. 1), yang merupakan tempat penambangan oli terbesar milik Irak. Selain itu perlu diketahui juga bahwa Irak dan Kuwait merupakan sesama negara yang memiliki persediaan oli petroleum di teluk Persia (*Persian Gulf*), minyak di teluk tersebut ditetapkan sebagai minyak utama dunia dengan persediaan yang jauh melebihi persediaan cadangan oli Amerika Serikat dan Uni Soviet (Nick Ritchie, 2007, p. 9) sehingga wilayah tersebut memiliki potensi persediaan sumber daya oli yang kuat. Kedua, sebelumnya Kuwait memberikan pinjaman utang perang bernilai miliaran dolar terhadap Irak sebagai biaya perang Irak-Iran (Long, 2004, p. 27), perang tersebut berlangsung pada tahun 1980-1988. Jadi mengapa invasi Kuwait terjadi? Dari hasil analisa tersebut, motif dari tindakan Irak melakukan invasi terhadap Kuwait didasari oleh kepentingan ekonomi negaranya, hal tersebut dapat dilihat dari keuntungan ekonomi yang akan didapat oleh Irak dengan dilakukannya invasi terhadap Kuwait. Keuntungan ekonomi tersebut antara lain adalah penghapusan hutang perang Irak-Iran di masa lampau dan penggandaan persediaan minyak dengan menduduki Kuwait.

Pertempuran yang terjadi antara AS dengan Irak perihal invasi Kuwait dikenal dengan nama Perang Teluk I (*Persian Gulf War I*). Sebelum pertempuran antara pasukan aliansi dan Irak terjadi, pada tanggal 3 Agustus Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan Irak untuk menarik diri dari Kuwait, dan pada 6 Agustus dewan tersebut memberlakukan sanksi ekonomi berupa larangan perdagangan dengan Irak di seluruh dunia (Augustyn, 2003, p. 1). Irak merespon sanksi tersebut dengan semakin gencar memperluas dan mempertahankan kedudukannya di Kuwait. Karena situasi di Kuwait tidak berubah dengan adanya ultimatum sanksi ekonomi, maka Dewan Keamanan PBB memberikan hak penggunaan kekuatan (*The use of force*) kepada pasukan aliansi untuk melakukan operasi pembebasan di Kuwait. Pemberian hak penggunaan kekuatan tersebut terjadi pada tanggal 29 November 1990 dan Irak diberi batas waktu untuk meninggalkan Kuwait maksimal pada tanggal 15 Januari 1991. Ultimatum penggunaan kekuatan oleh pasukan aliansi tidak menghentikan pendudukan Irak di Kuwait. Irak menghiraukan ultimatum tersebut kemudian sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam ultimatum tersebut pada tanggal 15 Januari

tahun 1991, pasukan aliansi yang semula mengumpulkan 600.000 pasukan, kini telah bertambah jumlahnya hingga mencapai 700.000 pasukan. Pasukan tersebut terdiri dari 540.000 pasukan AS dan sejumlah kecil dari negara aliansi seperti Inggris, Prancis, Mesir, Saudi, Suriah, dan berbagai negara lainya (Augustyn, 2003, p. 1).

Serangan militer aliansi terhadap Irak dimulai pada 16 Januari 1991 dan merupakan pertanda awal dimulainya Perang Teluk I. Pasukan aliansi fokus pada penyerangan udara dan target utama mereka adalah pertahanan Irak. Dalam pertempuran invasi Kuwait, perbedaan teknologi perang antara pasukan Irak dan pasukan aliansi sangat terlihat pada perbedaan persenjataan misil diantara kedua pihak. Rudal atau misil yang dimiliki oleh angkatan udara AS merupakan rudal Cruise tipe 1980an yang dibawa oleh kapal perang AS sedangkan rudal yang dimiliki Irak merupakan model misil Scud yang lebih tua dibandingkan milik AS yaitu model tahun 1950-an. Kekuatan jarak misil tipe Cruise yang dimiliki AS dapat beroperasi hingga 2.400 km dengan radius akurasi 50m sedangkan misil Scud Irak hanya memiliki jangkauan 500 km (Nick Ritchie, 2007, p. 15). Saddam Hussein juga sempat mengarahkan misil Scud nya kearah Israel dengan harapan mencari dukungan negara-negara Arab dan menekan pasukan sekutu, namun tindakan tersebut tidak memiliki pengaruh besar terhadap situasi Perang Teluk pada saat itu (Carl Kaysen, 2002, p. 21).

Setelah perang misil berakhir, pertempuran berlanjut pada tahap selanjutnya yaitu pertempuran antara pasukan darat sekutu melawan Irak. Tahap akhir ini merupakan bagian dari operasi pasukan sekutu yang dinamakan "*Operation Desert Sabre*" dimana kendaraan bersenjata sekutu dimajukan sebagai dorongan akhir pada pertahanan Irak di Kuwait. Serangan ini merupakan serangan terbesar pada bagian darat yang diluncurkan oleh pasukan sekutu. Operasi ini aktif pada tanggal 24 Februari, hingga pada tanggal 27 Februari, pasukan sekutu telah menghancurkan dan memukul mundur sebagian besar pasukan Irak. Pada saat itu Presiden Bush mengumumkan gencatan senjata pada 28 Februari 1991 dan mengakhiri perlawanan Irak di Kuwait. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan bahwa perlawanan dari Irak sudah runtuh secara keseluruhan (Augustyn, 2003, p. 1).

Berakhirnya pertempuran di Kuwait bukan merupakan akhir dari konflik AS-Irak, hal tersebut dikarenakan rezim Saddam Hussein yang masih aktif dalam pemerintahan Irak. Korban pasukan perang dari sekutu berjumlah 148 dari pasukan AS, 24 dari pasukan Inggris, 2 dari Perancis, 39 dari negara sekutu Arab (Mesir, Arab Saudi, dsb). Sementara korban dari pasukan Irak diperkirakan lebih dari 100.000 tentara Irak yang tewas dalam pertempura

Kuwait. Sekitar 300.000 luka-luka, 150.000 tentara yang masih tersisa dan 60.000 ditawan (CNN, 2001, p. 1). Setelah berakhirnya invasi atas Kuwait dan Perang Teluk I menandakan dimulainya tahap konflik bersenjata selanjutnya antara Irak dengan AS terutama konflik terkait senjata kimiawi dan tuntutan AS dalam pemberhentian kekuasaan rezim Saddam Hussein atas Irak.

### **2.1.2 Latar Belakang Perang Irak Tahun 2003**

Kekalahan Irak pada Perang Teluk I dalam perebutan wilayah di Kuwait belum menghentikan kekuasaan rezim Saddam Hussein atas Irak. Konflik bersenjata antara AS dengan sekutu melawan Irak berlanjut pada perang Irak tahun 2003 dengan fokus utama perang adalah pemberhentian rezim Saddam Hussein, tuntutan agar Saddam meninggalkan Irak, dan potensi keberadaan senjata kimiawi. Perang Irak terjadi pada bulan Maret 2003 dan juga dikenal dengan nama Perang Teluk II (*Persian Gulf War II*). Tidak lupa, sebelum invasi Irak terjadi, AS menjadi target serangan terorisme pada tanggal 11 September 2001, insiden tersebut secara tidak langsung ikut berpengaruh sebagai penyebab terjadinya perang Irak. Serangan terorisme tanggal 11 September 2001 tersebut merupakan salah satu faktor pemicu yang berperan dalam meyakinkan para aktor pembuat keputusan AS bahwa diperlukan perubahan-perubahan terhadap beberapa rezim serta penanganan negara-negara yang berpotensi memiliki hubungan dengan terorisme. Untuk itu AS perlu merubah rezim atau status quo penguasa yang sedang berkuasa di berbagai negara di timur tengah dengan kondisi bahwa pemegang kekuasaan tersebut memiliki hubungan atau jaringan tertentu dengan terorisme. Salah satu contoh dari perubahan status quo tersebut adalah pemberhentian rezim kekuasaan Saddam Hussein yang diisukan memiliki senjata pemusnah massal, keterlibatannya dalam invasi Kuwait, dan dinilai dapat memberikan inspirasi pada para teroris untuk terus melakukan perlawanan (Gordon, 2004, p. 85). Meskipun Irak tidak terlibat langsung dalam penyerangan insiden 11 September, hal tersebut tidak menghalangi intervensi AS didalam perubahan status quo di Irak.

Kesimpulannya, setelah terjadinya serangan terorisme tersebut Presiden George W. Bush mendeklarasikan kampanye perang terhadap terorisme pada tanggal 13 November 2001. Presiden Bush memberikan tanggapan bahwa serangan 11 September adalah tindakan terorisme internasional dan mendeklarsikan perang kepada pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden serta para pengikutnya. Pemerintahan Bush juga berpendapat bahwa mereka memiliki hak untuk menahan setiap anggota al Qaeda dan mereka yang diduga mengancam

keamanan nasional (Paust, 2007, p. 47). AS juga menentukan beberapa negara yang dianggap sebagai sumbu kejahatan (*Axis of Evil*) dan dicurigai memiliki potensi terorisme, negara-negara tersebut antara lain adalah Irak, Iran, Suriah, Libya, Kuba (Rogers, 2006 p. 3). Bisa diartikan bahwa perang melawan terorisme (*War on Terror*) adalah kampanye yang mendeklarasikan perang atau konflik bersenjata dengan cakupan ruang lingkup target yang hampir tak terbatas. Target dari pemberantasan teror dari kampanye ini adalah rantai terorisme yang dimiliki Al-Qaeda, beberapa negara di timur tengah seperti Irak dan Afghanistan misalnya adalah contoh negara yang menjadi target dengan masing-masing alasan tertentu. Irak diincar karena rezim Saddam Hussein dinilai berbahaya bagi AS dengan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal, sedangkan Afghanistan diincar karena rezim kelompok Taliban yang memiliki koneksi dengan jaringan teror Al-Qaeda pada waktu itu (Jackson, 2020, p. 1). Perang terhadap terorisme memperluas jarak hubungan antara AS dengan negara-negara lain terutama mereka yang dianggap sebagai sumbu atau poros kejahatan.

Pada tahun 2002, AS dibawah pemerintahan Bush beranggapan bahwa AS sangat rentan terhadap serangan terorisme, Bush ingin menghilangkan sumber-sumber terorisme sampai ke akarnya. Target dari pemberantasan teror yang dikampanyekan oleh Bush adalah pemberhentian rantai terorisme Al-Qaeda. Negara Irak dan Afghanistan adalah contoh negara yang menjadi target tersebut. Irak diincar karena rezim Saddam Hussein dinilai berbahaya bagi AS dengan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal atau WMD (Weapons of Mass Destruction), sedangkan Afghanistan diincar karena rezim kelompok Taliban yang berada disana memiliki koneksi dengan jaringan teror Al-Qaeda pada waktu itu (Jackson, 2020, p. 1). Pendapat AS perihal kepemilikan senjata tersebut awalnya didasarkan permasalahan bahan kimiawi nuklir yang dimiliki Irak, tepatnya pada akhir tahun 1999, dimana Menteri Pertahanan AS Bill Cohen yang waktu itu berada dalam masa pemerintahan Presiden Bill Clinton berpendapat bahwa Irak masih berusaha mengumpulkan bahan nuklir dan mendesak agar pengawasan maupun penyelidikan oleh PBB di Irak diteruskan sebagai langkah pencegahan (Nick Ritchie, 2007, p. 22).

Dari data tersebut pendapat atau tuduhan Bush mengenai kepemilikan WMD oleh Irak bukanlah hal yang baru karena bahaya potensi senjata kimiawi maupun nuklir Irak merupakan permasalahan yang sudah ada di masa lalu dan masih belum terselesaikan. Pada akhirnya dilakukan upaya penyelidikan keberadaan senjata tersebut yang tidak hanya dilakukan oleh AS, namun juga dibantu oleh badan khusus penyelidik yang dikerahkan oleh

PBB yaitu United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) badan tersebut diberikan tugas sesuai dengan resolusi no 1284 terkait penyelidikan bahan maupun tempat-tempat yang dicurigai sebagai sumber senjata pemusnah masal tersebut (United Nations Security Council Resolution 1284. Tahun 1999). Dari catatan inspeksi UNMOVIC di New York, jelas bahwa beberapa lokasi yang dicurigai sebagai penyimpanan WMD adalah fasilitas dan laboratorium yang sama dengan yang telah diteliti oleh kelompok inspeksi PBB jauh sebelum invasi Irak dimulai yaitu pada tahun 1990-an. Hasil akhir yang menjadi kesimpulan dari investigasi PBB muncul pada pertengahan tahun 1990-an, hasil investigasi tersebut melaporkan bahwa sejumlah besar program senjata nuklir, kimia, dan biologi Irak telah dihancurkan atau dianggap tidak berbahaya di bawah pengawasan PBB. Pada tahun 1996 terdapat laporan khusus IAEA kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tidak ada senjata nuklir yang diproduksi di Irak, bahan-bahan nuklir terlarang telah dikeluarkan dari negara itu, dan bahwa tidak ada program senjata nuklir rahasia yang ditemukan (Cleminson, 2003, p. 1).

Pada tanggal 17 Maret 2003, dengan menganggap bahwa upaya penyelesaian secara diplomatik lebih lanjut oleh Dewan Keamanan sia-sia karena Saddam tidak mau meninggalkan Irak meskipun itulah tuntutan AS, Bush menyatakan dengan mengakhiri hubungan diplomasi dan mengeluarkan ultimatum kepada Saddam, memberikan waktu dalam 48 jam agar Saddam Hussein meninggalkan Irak. Tuntutan dan ultimatum perang tersebut hanya diusulkan oleh AS, keputusan untuk berperang melawan Irak didukung oleh beberapa negara besar yang setuju mengenai penggunaan kekuatan militer kepada Irak yaitu Inggris, Polandia, dan Australia dengan alasan dukungan yang sama yaitu dengan mendukung AS memerangi Irak adalah bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dunia (*world order*) (Philip H. Gordon, 2004, p. 79). Sementara pihak-pihak yang menentang terjadinya perang terhadap Irak adalah dua negara besar dari Eropa yaitu Perancis, dan Jerman. Alasan utama kedua negara tersebut keberatan dengan eskalasi perang yang semakin meningkat antara AS dengan Irak disebabkan preferensi kedua negara tersebut yang berharap konflik antara AS-Irak dapat melalui penyelesaian masalah secara diplomatik (damai) daripada peperangan (Miller, 2004, p. 35). Namun pada akhirnya, meskipun terdapat berbagai perbedaan pendapat tentang bagaimana cara penyelesaian konflik antara AS-Irak dimana negosiasi diplomatik dan perang menjadi pilihan, perang Irak tetap terjadi pada tahun 2003. Perang tersebut dimulai pada tanggal 19 Maret karena Saddam menghiraukan ultimatum dan menolak untuk meninggalkan Irak (Pletcher, 2007, p. 1).

Beberapa negara seperti Perancis dan Jerman berpendapat bahwa akan lebih baik apabila perdamaian secara diplomatik bisa dicapai antara AS dengan Irak. Beberapa waktu sebelum perang terjadi terdapat berbagai usaha yang datang dari negara lain untuk mengubah pemikiran AS terkait perang. Perdana Menteri Jacques Chirac misalnya, dalam wawancara pada tanggal 9 September 2002, Chirac berpendapat bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak memerangi Irak lewat keputusannya sendiri namun juga harus mempertimbangkan konsultasi dengan dewan keamanan PBB (Miller, 2004, p. 35). Dalam wawancara tersebut Perdana Menteri Jacques Chirac juga berusaha untuk mengingatkan AS bahwa keputusan militer (perang) harus diputuskan secara bersama dan bukan lewat keputusan AS sendiri. Chirac berpendapat bahwa, akan lebih baik apabila aksi militer terhadap Irak merupakan alternatif terakhir yang harus dihindari apabila memungkinkan. Selain itu keputusan untuk memerangi Irak harus koheren (bersatu) lewat keputusan Dewan Keamanan PBB (Times, 2002, p. 1).

Meskipun demikian pada akhirnya perang antara AS-Irak tidak terhindarkan dan malam pertama perang terjadi pada tanggal 19 Maret 2003, dimulai dengan operasi militer AS yang menandakan awal mula perang dengan nama "*Operation Iraqi Freedom*". Pasukan sekutu memulai penyerangan lewat bagian selatan Irak, terdapat dua pembagian regu pasukan penyerang, regu pertama adalah pasukan pesawat perang yang bertugas melumpuhkan pasukan artileri (meriam) Irak. Regu darat akan meneruskan serangan setelah regu pesawat perang. Hal tersebut dikarenakan pasukan artileri menjadi masalah utama bagi regu darat AS (Miller, 2004, p. 46). Pertempuran memuncak ketika pasukan sekutu mencapai Baghdad, dimana para pendukung Saddam dan partai sosialis Ba'ath Irak (partai yang dipimpin Saddam Hussein) melakukan perlawanan terakhir dalam mempertahankan Irak. Pertempuran di Baghdad berlangsung dari tanggal 21 Maret hingga 9 April 2003 dimana perlawanan Baghdad sudah jatuh dan dimenangkan oleh pasukan sekutu. Kekalahan Saddam Hussein dan pasukan perlawanan Irak menyebabkan para petinggi Irak terutama Saddam Hussein untuk melarikan diri dari Baghdad dan bersembunyi. AS secara resmi mengumumkan diakhirinya pertempuran besar di Irak pada 1 Mei 2003. Keberadaan Saddam tidak diketahui selama berbulan-bulan hingga pada akhirnya berhasil ditemukan dan ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003 di kota Ad-Dawr, Tikrit, Irak. Setelah penangkapan Saddam tidak ditangani oleh AS tetapi diserahkan langsung kepada pihak otoritas Irak pada Juni 2004 untuk diadili atas berbagai kejahatan yang sudah dilakukan. Saddam dijerat atas tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dieksekusi pada tanggal 30 Desember 2006 (Pletcher, 2007, p. 1).

### 2.1.3 Keterlibatan NATO dalam perang Irak

North Atlantic Treaty Organization (NATO) awalnya merupakan organisasi yang dibentuk secara khusus oleh negara-negara Barat seperti AS, Kanada, Portugal, dan lain sebagainya sebagai upaya untuk bersaing dengan Pakta Warsawa Uni Soviet (Warsaw Pact). Dengan kata lain awalnya tugas NATO selama Perang Dingin dianggap hanya ditujukan untuk menghalangi serangan Uni Soviet untuk menyebarkan pengaruhnya di Eropa Barat dan negara-negara anggota NATO. Meskipun demikian NATO sekarang merupakan satu satunya organisasi aliansi militer yang bertahan pasca perang dingin, sementara Pakta Warsawa milik Soviet telah runtuh. Dengan berakhirnya perang dingin NATO mulai memperluas penerimaan anggota baru, mengadopsi misi perdamaian baru, dan, menerapkan kembali Pasal 5 NATO yang berkaitan dengan pertahanan kolektif bersama (*Collective Defense Measures*) sebagai tanggapan atas serangan teroris 11 September yang terjadi (Moore, 2007, p. 9).

NATO sebagai badan organisasi memang tidak terlibat secara langsung dalam perang Irak, namun lebih kepada penyediaan bantuan pasukan pertahanan, dan logistik untuk menjaga negara anggotanya. Misalnya dalam kasus negara Turki yang meminta bantuan keamanan pada bulan Februari 2003 pasca meningkatnya ketegangan perang Irak, NATO sebagai organisasi memberikan bantuan berupa upaya pencegahan dan pertahanan dengan mengerahkan pesawat pengintai serta rudal pertahanan disekitar wilayah Turki dengan tujuan mengamankan daerah negara Turki yang berdekatan dengan perang di Irak (NATO, 2015, p. 1). Dengan kata lain tugas NATO semata-mata hanya menjalankan tugasnya untuk melindungi negara anggota, permasalahan mengenai apa yang dilakukan negara anggotanya terhadap perang Irak merupakan tanggung jawab serta keputusan negara itu sendiri. Contoh tindakan NATO yang mencerminkan pelaksanaan tugas pelindungan dan peningkatan pertahanan negara anggotanya dapat dilihat ketika kapal perang AS bergerak menuju Teluk Persia (*Persian Gulf*) melalui Laut Mediterania. Pasukan NATO ditugaskan untuk menjaga pangkalan-pangkalan negara NATO yang sedang berperang seperti AS, Inggris, dan negara-negara lain yang ikut serta dalam perang Irak. Alasan diberikanya bantuan pertahanan dari NATO kepada negara-negara tersebut berasal dari pertimbangan bahwa daerah yang dijaga oleh pangkalan laut negara-negara tersebut melemah akibat ditinggal perang (Gordon, 2004, p. 137).

Perang Irak sendiri merupakan pemicu perbedaan pendapat diantara negara-negara yang menjadi anggota NATO perihal keputusan untuk berperang terhadap Irak atas kasus Saddam Hussein. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan respon negara-negara



anggota NATO yang memberikan dukungan terhadap perang AS-Irak serta alternatif penyelesaian secara diplomatik. Negara anggota yang mendukung perang antara lain adalah Inggris dan Polandia. Adapun dua negara besar dari Eropa seperti Jerman dan Prancis yang kurang setuju terhadap eskalasi perang. Perpecahan antara negara-negara NATO juga dapat dilihat ketika negara Turki menolak penggunaan wilayah teritorialnya sebagai jalur perang yang akan digunakan oleh pasukan AS untuk masuk ke Irak (Woodward, 2004, p. 126).

Keterlibatan langsung NATO dalam konflik AS-Irak lebih terlihat pasca pertempuran di Irak sudah berakhir, dimana NATO mendirikan NATO Training Mission-Iraq (NTM-I) sebuah misi pelatihan yang menargetkan pemulihan keamanan negara Irak. NTM-I dibuat berdasarkan permintaan pemerintah sementara Irak dikarenakan kekosongan rezim pemerintahan di Irak setelah Saddam jatuh. Negara-negara anggota NATO menyetujui pembentukan misi pelatihan pasukan keamanan tersebut di Konferensi Tingkat Tinggi Istanbul pada bulan Juni 2004. Pelatihan pertama kalinya terjadi di Baghdad pada awal Agustus 2004 dan setiap negara anggota NATO yang terlibat memiliki program pelatihannya masing-masing (Blanchard, 2007, p. 3). Program dari Jerman misalnya, melakukan pelatihan bagi para personel militer dan berkontribusi terhadap pengembangan angkutan udara Irak sebanyak 652.000 dolar, pelatihan mereka dilakukan dengan pengawasan NTM-I di fasilitas pelatihan NATO yang bertempat di Jerman, adapun program pengiriman instruktur pelatihan militer yang dilakukan oleh Slovakia dengan mengirim 5 instruktur ke Irak, kemudian ditarik pada bulan April 2007 (Blanchard, 2007, p. 4-5).

## **2.2 Kekuatan Militer AS**

### **2.2.1 Pasukan Militer AS dalam Perang dan Negara Sekutu**

Sebelumnya sudah dijelaskan latar belakang dan proses perang di Irak, maka dalam bagian ini akan dibahas secara khusus mengenai jumlah pasukan perang yang terlibat dari pihak AS bersama aliansi. Dalam berperang melawan Irak, AS tidak hanya mengerahkan pasukan dari dalam negaranya saja namun juga melibatkan pasukan tambahan dari negara sekutu yang ikut serta membantu AS dalam perang tersebut. Ketika perang Irak pertama kali dimulai bulan Maret tahun 2003, beberapa negara besar yang menjadi sekutu AS sudah mulai mengirim pasukan bantuan untuk membantu AS. Negara-negara tersebut antara lain adalah Inggris, Polandia, dan Australia. Jumlah pasukan militer sekutu yang dikirim sebagai bantuan untuk AS adalah 46.000 dari Inggris, 2000 dari Australia, dan terakhir dari Polandia sebanyak 180 pasukan (Davidson, 2011, p. 1). Sementara itu jumlah pasukan asli dari AS yang dikirim

ke Irak adalah sekitar 130.000 pasukan (CNN, 2003, p. 1). Apabila dijumlahkan dengan pasukan yang dikirim negara aliansi maka total pasukan militer yang dimiliki AS dan sekutu berjumlah sekitar 178.180 pasukan. Kemudian jumlah pasukan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein pada waktu itu berjumlah sekitar 389.000 pasukan yang terdiri dari 350.000 pasukan darat, 2.000 angkatan laut Irak, 20.000 angkatan udara dan 17.000 pertahanan udara Irak (Windle, 2003, p. 1).

Apabila diperhatikan Irak memiliki keunggulan dari segi jumlah pasukan, namun yang menjadi kunci kemenangan pasukan sekutu atas Irak adalah perbedaan teknologi perang yang dimiliki. AS bersama negara aliansi menggunakan keunggulan teknologi perang udara sebagai kunci kemenangan, karena pihak dengan kekuatan udara terkuat dapat melindungi atau memberikan bantuan kepada pasukan darat maupun laut yang dimiliki pihak tersebut. Perbedaan teknologi tersebut dapat dilihat dari model pesawat tempur yang dimiliki, pasukan sekutu dilengkapi dengan model pesawat yang dianggap modern pada waktu itu seperti pesawat tempur B-52, AC-130, pesawat bom (*bombers*) B-1B, helikopter tempur (*gunship*), UK Tornados dan lain sebagainya. Jumlah pesawat tempur yang dimiliki AS dan sekutu berjumlah sekitar 800 pesawat tempur termasuk dari berbagai jenis yang sudah disebutkan (Windle, 2003, p. 1). Sementara pesawat tempur Irak berjumlah kurang dari 100 buah. Dari jumlah tersebut terdiri dari dua jenis pesawat terkuat yang dimiliki Irak pada waktu itu yaitu, model lama buatan Uni-Soviet bernama Mikoyan-Gurevich (Mig) dan Sukhoi (SU) (Stilwell, 2020, p. 1). Perbandingan lain juga bisa dilihat dari mesin tempur yang dimiliki kedua pihak di bagian darat. Dari pihak Irak tank yang dikerahkan tidak terlalu kuat alasannya adalah, meskipun Irak memiliki jumlah sekitar 2.000 tank tempur, tetapi hanya sekitar 700 dari jenis T-72 Soviet yang masih bisa digolongkan sebagai modern. Sementara jenis lainnya adalah model tank soviet lama. Sedangkan AS dan sekutu dilengkapi oleh 1.000 tank tempur utama M1 Abrams dari AS dan Challenger 2 dari Inggris (Windle, 2003, p. 1). Kedua jenis tank AS dan Inggris tersebut jauh lebih modern, sehingga Irak tidak memiliki mesin tempur yang sebanding di darat. Dapat disimpulkan meskipun jumlah keseluruhan pasukan Irak (389.000 pasukan termasuk pasukan pejalan kaki atau *infantry*) lebih banyak dari AS (130.000 pasukan), perbedaan perlengkapan mesin tempur perang yang digunakan kedua belah pihak menjadi faktor pembeda utama kekuatan perang diantara keduanya.

Dalam perang Irak, perlu diketahui bahwa Inggris merupakan negara yang sangat dekat hubungan diplomatiknya dengan AS dan menyumbangkan pasukan bantuan dengan jumlah terbesar kepada AS dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh negara lain.

Perlu diketahui juga bahwa Perdana Menteri Inggris Tony Blair memiliki kepercayaan penuh terhadap keputusan AS dan didorong oleh keinginannya untuk menjaga hubungan diplomatik yang dekat antara Inggris-AS (Davidson, 2011, p. 27), sehingga tidak mengherankan apabila Inggris mendukung penuh keputusan AS untuk berperang dengan Irak. Lalu bagaimana dengan dua negara lain yaitu Australia dan Polandia? Meskipun Australia dan Polandia tidak menyumbangkan pasukan sebanyak Inggris kedua negara tersebut tetap memberikan kontribusi dalam perang serta alasan tersendiri untuk membantu AS. Hal tersebut dikarenakan, berbeda dengan Jerman dan Perancis yang kurang setuju akan keputusan AS memerangi Irak karena lebih mengutamakan penyelesaian secara damai. Polandia maupun Australia setuju membantu AS dengan kepercayaan yang sama bahwa potensi dari bahaya yang ditimbulkan senjata pemusnah massal yang dicurigai dimiliki Irak adalah prioritas utama untuk menjaga kedamaian dunia (Philip H. Gordon, 2004, p. 129).

Dengan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut AS mendapat bantuan dan kepercayaan atas keputusan yang dilakukan untuk berperang. Selama masa jabatannya, Presiden Bush juga sengaja berusaha mengembangkan hubungan khusus dengan negara-negara seperti Inggris, Spanyol, Australia, Polandia, dan negara-negara lain yang dia rasa memiliki simpati terhadap kepentingan maupun tujuan dari berbagai kebijakan Amerika Serikat (Philip H. Gordon, 2004, p. 54). Tentu saja dengan memeperdalam hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut dapat memudahkan untuk menghasilkan negara sekutu yang dapat membantu dalam perang. Lalu dapat disimpulkan, baik jumlah besar maupun kecil pasukan yang dikirim negara-negara yang mendukung AS semuanya merupakan kontribusi aktif dalam perang yang mampu membantu memperkuat kekuatan militer AS.

### **2.2.2 AS sebagai Polisi Dunia**

Keberadaan AS yang mampu menjadi penggerak atau setidaknya mempengaruhi negara lain untuk ikut bersamanya ketika merespon suatu konflik internasional merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan. AS dapat disebut sebagai negara adidaya, negara hegemon, maupun polisi dunia. Konsep adidaya maupun hegemon umumnya identik dengan kekuasaan yang lebih dibanding penguasa lainya, namun polisi dunia memiliki konsep yang berbeda. Polisi dunia lebih kearah pengawasan, kontrol, maupun penegakan suatu kebijakan maupun ideologinya, misalnya AS berusaha menegakkan demokrasiya di Irak lewat upayanya untuk menghentikan rezim Saddam Hussein. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2005 misalnya, Presiden AS George W. Bush menyatakan bahwa merupakan tugas Amerika

Serikat untuk mendukung pertumbuhan gerakan dan institusi demokrasi di setiap bangsa, dan budaya dengan tujuan utama untuk mengakhiri tirani di dunia (Dennis Jett, 2017, p. 1). Pernyataan tersebut seolah menunjukkan bahwa AS memiliki tugas untuk membantu penyebaran demokrasi di dunia, terutama negara-negara yang dianggap tidak aman karena permasalahan rezim.

Meskipun tidak mengimplikasikan AS sebagai polisi dunia, pernyataan Bush dapat diartikan bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan dominan dalam sistem internasional saat ini dan pada dasarnya sebuah aktor dengan kekuatan dominan dapat bertindak sesuai keinginan didukung dengan kebebasan besar untuk melakukan tindakan tersebut (Rosemary Foot, 2003, p. 11). Ketika perang dingin terjadi AS sebagai polisi dunia, membangun berbagai program militer dan ekonomi untuk bisa mengakomodasi intervensi AS selama perang untuk mengatur sekaligus mencegah pengaruh komunisme, sehingga bisa disimpulkan intervensi global menjadi ciri khas kontrol AS pasca perang dunia ke-II berakhir (Robinson, 1996, p. 14). Demokrasi melawan komunisme adalah tema utama konflik perang dingin, AS berusaha mengatur pengaruh dengan membedakan negara-negara yang memihak NATO dan AS serta mereka yang bersebrangan dengan demokrasi dengan kata lain blok yang berpihak pada komunisme (*Second World*). Konflik perang Irak termasuk dalam babak baru yang harus dihadapi AS dan termasuk dari bagian pertempurannya untuk melawan terorisme. Bush sering menyebutkan keberadaan teror dengan skala global (*global terror*) yang seolah-olah menjadi kata kunci untuk mengidentifikasi aksi terorisme yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 dan sebagai wujud perlawanan AS dengan berperang terhadap teror tersebut (Charles Philippe David, 2006, p. 118).

### **2.3 Eksistensi PMC**

Keberadaan PMC yang seringkali melibatkan diri dalam konflik internasional sebagai wujud penyediaan jasanya sangatlah mengkhawatirkan. Untuk itu pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengenalan awal PMC sebagai organisasi yang menyediakan jasa berupa kekuatan militer sebagai sektor privat, definisi, keuntungan, dan risiko penggunaannya. Definisi dari PMC sendiri adalah perusahaan atau Industri militer swasta yang memaksimalkan keuntungan lewat penyediaan jasa-jasa keamanan dan militer. Layanan ini termasuk logistik, pengumpulan informasi dan analisis intelijen, bantuan militer dan taktik perang, pelatihan, dan bantuan operasional (Allison Stanger, 2006, p. 5). PMC umumnya digunakan dalam konflik bersenjata namun juga dapat terlibat dalam berbagai program-

program pelatihan. PMC memiliki hubungan khusus dengan negara-negara kontraktor yaitu negara yang merupakan pengguna jasa PMC. Bagi negara pengguna terdapat keuntungan sekaligus risiko dari penggunaan PMC. Terdapat banyak keuntungan yang bisa didapat negara kontraktor PMC ketika menggunakannya dalam konflik bersenjata. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain seperti memotong anggaran militer yang besar, korban dari pertempuran tidak akan sepenuhnya melemahkan pasukan militer asli dari pihak negara kontraktor, dan kekuatan yang disewa terjamin kualitasnya, dan lain-lain. Perlu diketahui juga bahwa pasukan PMC masih berada dalam wilayah abu-abu dalam hukum internasional karena tidak tergolong secara resmi dalam pasukan perang negara pengguna (Moshe Schwartz, 2008, p. 15). Perlu diketahui juga penggunaannya juga memiliki risiko atau dampak negatif. Misalnya penggunaan PMC selalu diawasi dan dipertanyakan hukumnya dalam ranah internasional. Adanya tuntutan pertanggungjawaban atas penggunaan PMC tersebut (Allison Stanger, 2006, p. 12). Penggunaan jasa PMC juga berpotensi untuk mendorong negara-negara lain untuk ikut serta menggunakan jasa tersebut dalam konflik bersenjata sebagai alat penyeimbang kekuatan antar negara.

Regulasi PMC masih berada pada wilayah abu-abu dalam konflik internasional, legalitas PMC biasanya dipertanyakan dalam skenario dimana personel PMC yang ditugaskan dalam suatu konflik terlibat dalam suatu insiden maupun kecelakaan yang menimbulkan kebingungan mengenai tuntutan tanggung jawab (Tonkin, 2011, p. 180). Alasan mengapa skenario tersebut termasuk dalam wilayah abu-abu dikarenakan pasukan tersebut tidak secara resmi merupakan bagian pasukan yang sah milik negara pengguna jasa PMC tersebut. Mengingat bahwa pasukan PMC pada awalnya merupakan kepemilikan oleh perusahaan penyedia jasa tersebut dan keterlibatan pasukan PMC semata-mata didasarkan oleh kontrak dengan negara pengguna. Penggunaan PMC oleh negara besar, terlebih lagi negara yang sudah memiliki kekuatan militer yang kuat seperti AS sangatlah mengkhawatirkan, untuk itu diperlukan suatu regulasi yang secara khusus bisa digunakan untuk mengikat PMC dalam peraturan internasional secara sah dan tepat. Menurut Stanger (Allison Stanger, 2006, p. 5), dibutuhkan penyesuaian dalam hukum internasional dan lembaga internasional untuk mengakomodasi tantangan hukum yang ditimbulkan oleh sektor perusahaan PMC.

## 2.4 Kesimpulan

Perang Irak memiliki serangkaian peristiwa historis yang menjadi pemicu awal konflik bersenjata antara Irak, AS, dan negara sekutu. Dimulai dari invasi Irak terhadap Kuwait dan permasalahan oli yang ada disana menyebabkan Irak untuk bergerak melakukan invasi dibawah perintah rezim Saddam Hussein pada tanggal 2 Agustus 1990. Invasi Kuwait semakin memperkuat eskalasi konflik antara pasukan sekutu dengan Irak karena Saddam tidak mau melepaskan Kuwait dan terus mempertahankan pendudukanya disana meskipun sudah diberi ultimatum oleh PBB, sekaligus diberi hukuman sanksi ekonomi perdagangan yang melarang perdagangan Irak dengan negara-negara lain. Pada akhirnya Perang Teluk I tidak terhindarkan dan konflik menjadi berkepanjangan. Pertempuran Perang Teluk I dimulai sejak bulan Januari 1991 hingga pada akhirnya Irak berhasil dipukul mundur dari Kuwait oleh pasukan sekutu setelah satu bulan masa peperangan yang berakhir pada akhir bulan Februari 1991. Setelah perang tersebut berakhir, konflik antara AS dan Irak mencapai babak baru yaitu perang Irak tahun 2003.

Pemicu perang Irak pada tahun 2003 disebabkan oleh dugaan kepemilikan senjata pemusnah massal (WMD) kimiawi yang dicurigai oleh AS dimiliki oleh Saddam Hussein. Tidak lupa bahwa sebelum perang Irak terjadi, eskalasi konflik sudah dimulai pasca insiden terorisme 11 september 2001. Pemerintahan Presiden George W. Bush memimpin AS dalam kampanye perang terhadap terorisme (*War on Terror*). Perang Irak dimulai pada bulan Maret tahun 2003 hingga diakhirinya lewat gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Bush pada awal mei 2003 dan berakhirnya secara resmi rezmi Saddam Hussein pasca penangkapannya pada bulan Desember 2003. Negara-negara NATO mengalami perpecahan perihal deklarasi perang terhadap Irak, Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa negara-negara Eropa seperti Jerman dan Perancis lebih menginginkan penyelesaian secara diplomatik. NATO terlibat dalam pendirian misi pelatihan pemulihan keamanan negara Irak dengan nama NATO Training Mission-Iraq (NTM-I). Negara anggota NATO yang terlibat dalam misi tersebut memiliki program pelatihanya masing-masing. Upaya pelatihan tersebut merupakan wujud bantuan program rekonstruksi keamanan negara Irak yang sudah disepakati oleh anggota negara-negara NATO.

Dari sini dapat diketahui bahwa AS memiliki hubungan diplomatik yang dekat dengan negara-negara tersebut, dan mereka juga merasakan pentingnya untuk menjaga hubungan diplomatik dengan AS. Hubungan aliansi ini telah memperdalam ikatan diplomatik diantara mereka, dan akan terus memberikan manfaat berupa sifat kooperatif diantara negara-

negara tersebut. Keberadaan pasukan PMC dalam perang pun dapat ikut serta mempengaruhi jalannya proses perang atau konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Meskipun dilengkapi dengan berbagai manfaat yang ada atas penggunaannya, PMC juga memiliki berbagai risiko bagi negara pengguna. Secara umum keberadaan PMC perlu diperhatikan dan diberikan regulasi yang secara khusus mengikat cara penggunaan jasanya.